



Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan Tahun 2023

Dyas Puzi Rahmadina

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok-Tanjungpinang, 29111. Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: dyaspuzi29@gmail.com*

Abstract. *Community-based village development serves as a crucial strategy to reduce regional disparities and enhance village self-reliance. However, among the 36 villages in Bintan Regency, only two were categorized as Independent Villages in 2023, one of which is Toapaya Selatan Village. This study aims to examine how community participation contributes to the achievement of Independent Village status in Toapaya Selatan. The research applied a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation involving 15 informants. The findings reveal that community participation occurred actively across four key stages: decision-making, implementation, benefit-taking, and evaluation. In the decision-making process, residents were engaged through structured deliberations beginning at the neighborhood (RT) level and culminating in the village development planning meeting (Musrenbangdes). In the implementation stage, participation was reflected in both physical development projects and empowerment activities that fostered local capacity. The benefit-taking stage showed that residents equitably shared the outcomes of development through a system of regional rotation and principles of fairness. In the evaluation stage, the community was provided with both formal and informal spaces to voice aspirations and feedback, ensuring accountability and inclusiveness in governance. Despite the relatively high level of participation, several challenges persisted, including the dominance of representative systems, which limited direct involvement of broader community members, and the need for stronger capacity-building efforts. These findings suggest that while Toapaya Selatan Village has successfully demonstrated the potential of community-based participation in achieving independent status, sustaining and replicating this success in other villages requires continuous strengthening of community capacity, more inclusive participatory mechanisms, and institutional support. Strengthening these aspects will not only enhance the quality of participation but also ensure sustainable development outcomes that can be applied as a model for other villages.*

Keywords: *Community Participation, Independent Village, Participatory Development.*

Abstrak. Pembangunan desa berbasis masyarakat merupakan strategi krusial untuk mengurangi disparitas regional dan meningkatkan kemandirian desa. Namun, dari 36 desa di Kabupaten Bintan, hanya dua yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri pada tahun 2023, salah satunya adalah Desa Toapaya Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap pencapaian status Desa Mandiri di Toapaya Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan 15 informan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terjadi secara aktif dalam empat tahap utama: pengambilan keputusan, implementasi, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Dalam proses pengambilan keputusan, warga dilibatkan melalui musyawarah terstruktur yang dimulai di tingkat RT dan berpuncak pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pada tahap implementasi, partisipasi tercermin dalam proyek pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan yang mendorong kapasitas lokal. Tahap pengambilan manfaat menunjukkan bahwa warga secara adil menikmati hasil pembangunan melalui sistem rotasi regional dan prinsip-prinsip keadilan. Pada tahap evaluasi, masyarakat diberikan ruang formal dan informal untuk menyuarakan aspirasi dan umpan balik, yang menjamin akuntabilitas dan inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun tingkat partisipasi relatif tinggi, beberapa tantangan tetap ada, termasuk dominasi sistem perwakilan, yang membatasi keterlibatan langsung anggota masyarakat yang lebih luas, dan perlunya upaya peningkatan kapasitas yang lebih kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Toapaya Selatan telah berhasil menunjukkan potensi partisipasi berbasis masyarakat dalam mencapai status mandiri, mempertahankan dan mereplikasi keberhasilan ini di desa-desa lain memerlukan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, mekanisme partisipatif

yang lebih inklusif, dan dukungan kelembagaan. Penguatan aspek-aspek ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas partisipasi tetapi juga memastikan hasil pembangunan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bagi desa-desa lain.

Kata kunci: Desa Mandiri, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Partisipatif.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Dalam konteks ini, konsep desa mandiri menjadi penting karena mencerminkan kemampuan suatu desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Desa mandiri tidak hanya diukur melalui aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ketahanan sosial dan ekologis sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Muallif 2024).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta perangkat teknis seperti Indeks Desa Membangun (IDM), pemerintah mendorong terciptanya desa-desa yang mandiri secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. IDM sendiri tersusun dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), yang semuanya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016). Dalam setiap dimensi ini, partisipasi masyarakat merupakan variabel kunci yang mencerminkan keterlibatan warga sebagai subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat.

Kondisi ini juga tercermin dalam tren data nasional dan regional. Berdasarkan data IDM tahun 2023 dan 2024, jumlah Desa Mandiri secara nasional mengalami peningkatan dari 11.456 desa menjadi 17.203 desa (KepmenDesa PDTT No. 174 Tahun 2023; No. 400 Tahun 2024). Di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, peningkatan jumlah Desa Mandiri juga signifikan: dari hanya dua desa pada 2023 menjadi 12 desa pada 2024. Salah satu desa yang mengalami lonjakan capaian adalah Desa Toapaya Selatan, yang berhasil meraih status Desa Mandiri dengan nilai IDM 0.8194 (KepmenDesa PDTT No. 174 Tahun 2023).

Keberhasilan Desa Toapaya Selatan tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari musyawarah perencanaan, pelaksanaan kegiatan gotong royong dan pemberdayaan, hingga evaluasi program dan pengembangan unit usaha desa seperti ekowisata TOSELA dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa juga menunjukkan inisiatif kuat dalam membuka ruang partisipasi melalui kebijakan pengadaan aset wisata, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara tepat sasaran (Anon n.d.).

Penelitian terdahulu seperti (Paiswandi 2020) menyoroti lemahnya partisipasi akibat rendahnya kapasitas aparatur desa, sementara (Siregar, Fernandez, and Tristanto 2023) meneliti peran partisipasi politik dalam mempertahankan status desa mandiri. Penelitian (Zaenadine*, Azijah, and Priyanti 2023) berfokus pada kolaborasi akuntabel antara pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan indeks ketahanan sosial. Ketiganya belum secara langsung mengaitkan partisipasi masyarakat dengan pencapaian status Desa Mandiri secara utuh.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menganalisis secara spesifik bagaimana partisipasi masyarakat dilihat dari kerangka teori Cohen dan Uphoff (1980) berkontribusi terhadap keberhasilan Desa Toapaya Selatan mencapai status Desa Mandiri. Keempat dimensi partisipasi yang dikaji meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, yang kesemuanya memberikan gambaran menyeluruh dan terukur tentang proses pembangunan partisipatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam mewujudkan desa mandiri pada tahun 2023, serta memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam penguatan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pembangunan. Menurut Sumaryadi (2005:46) dalam (Kaehe, Ruru, and Welson 2019), partisipasi mencakup ide, tenaga, waktu, keterampilan, dan dana. Effendi (2021) menekankan bahwa partisipasi lahir dari kesadaran untuk mendukung program sesuai kemampuan individu. Partisipasi mencakup tiga dimensi: suara, akses, dan kontrol terhadap kebijakan publik.

Arnstein (1969) dalam (Indriani, Asang, and Hans 2021) mengklasifikasikan partisipasi menjadi delapan tingkat berdasarkan kekuasaan, dari manipulasi hingga kontrol masyarakat. Chambers (1994) melalui metode PRA menekankan partisipasi berbasis pengetahuan lokal dan inisiatif masyarakat. Pretty (1995) membagi partisipasi dari manipulatif hingga swadaya. Namun, teori Cohen dan Uphoff menjadi dasar utama penelitian ini karena menawarkan struktur partisipasi yang menyeluruh, meliputi: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan kesepakatan bersama, termasuk hadir rapat, diskusi, serta memberi tanggapan atas program (Hutagalung 2022).

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan berdasarkan rencana yang telah disepakati.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Menunjukkan seberapa besar masyarakat menikmati hasil program, dilihat dari output dan kualitasnya (Rahmanita Fauzia and Arieffiani 2020).

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Melibatkan masyarakat untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana awal.

Teori ini dipilih karena bersifat integratif dan paling relevan dalam menganalisis proses pembangunan desa berbasis partisipasi.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis, partisipasi dapat berupa pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan dana. Efendi membedakan partisipasi menjadi:

- Vertikal, yaitu saat masyarakat mengikuti program dari pihak luar.
- Horizontal, yaitu inisiatif muncul dari masyarakat itu sendiri.

Basrowi menambahkan dua bentuk partisipasi lainnya, yaitu:

- Non-fisik, seperti dukungan terhadap kebijakan.
- Fisik, berupa kontribusi nyata seperti bantuan tenaga atau barang.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Nurbaiti & Bambang (2017) menyatakan bahwa faktor internal mencakup usia, pendidikan, pekerjaan, dan lokasi tinggal. Faktor eksternal meliputi pengaruh aktor seperti aparat desa, tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi. Nur (2023) membagi partisipasi menjadi dua sudut pandang:

- Internal, yaitu rasa memiliki terhadap kelompok.
- Eksternal, yaitu sejauh mana individu terlibat dalam lingkungan sosial.

(Effendi 2021) menyebut bahwa partisipasi tinggi akan muncul jika: isu dianggap penting, aksi diyakini berdampak, bentuk partisipasi diakui, dan kondisi mendukung. Pratikno dalam (Setiawan 2022) menambahkan empat faktor: kekuatan informasi, kepemimpinan, peran organisasi lokal, dan peran pemerintah desa.

Fungsi dan Manfaat Partisipasi

Menurut Carter fungsi partisipasi masyarakat meliputi: 1) Sebagai kebijakan, 2) Sebagai strategi, 3) Sebagai alat komunikasi 4) Sebagai alat penyelesaian sengketa, dan 5) Sebagai terapi. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bertanggung jawab;
- b. Memperkuat proses pembelajaran bersama;
- c. Meminimalisir rasa keteasingan dalam masyarakat;
- d. Meningkatkan dukungan serta penerimaan terhadap kebijakan pemerintah;
- e. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran politik;
- f. Menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; dan
- g. Menjadi sumber informasi yang berharga dan mencerminkan komitmen terhadap sistem demokrasi.

Desa Mandiri

Permendes No. 2 Tahun 2016 menyebut desa mandiri sebagai desa yang mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa mandiri tidak bergantung pada bantuan luar, memiliki produk unggulan, partisipasi tinggi, serta lembaga.

Upaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya bisa tercapai jika tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* akan memperkuat potensi lokal masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut (Ompusunggu 2022), terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam mendukung pembangunan desa mandiri, di antaranya:

- a. Menggali potensi dan kapasitas desa;
- b. Perencanaan dan membangun visi desa mandiri;
- c. Implementasi rencana pembangunan desa;
- d. Monitoring dan evaluasi pembangunan desa mandiri;
- e. Membangun jaringan kerja menuju desa mandiri;
- f. Memperkuat desa menuju desa mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016, IDM mengklasifikasikan desa menjadi lima status:

- Desa Sangat Tertinggal ($IDM \leq 0,4907$)
- Desa Tertinggal ($0,4907 < IDM \leq 0,5989$)
- Desa Berkembang ($0,5989 < IDM \leq 0,7072$)
- Desa Maju ($0,7072 < IDM \leq 0,8155$)
- Desa Mandiri ($IDM > 0,8155$)

Penentuan IDM didasarkan pada tiga dimensi ketahanan:

- Ketahanan Sosial: pendidikan, kesehatan, modal sosial, permukiman
- Ketahanan Ekonomi: produksi, akses pasar dan logistik, perbankan, keterbukaan wilayah
- Ketahanan Ekologi: kualitas lingkungan, kerentanan bencana, kesiapsiagaan

IDM membantu pemerintah dalam menetapkan status desa dan arah kebijakan pembangunan. Tujuannya untuk memastikan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai perbandingan dalam menulis penelitian. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan referensi. Melakukan penelitian tentunya harus sudah melakukan kajian pustaka, adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Table 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tentang	Teori
Paiswandi (2020)	"Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau" Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun belum menunjukkan kesejahteraan sosial yang optimal. Hal ini terbukti dari kurangnya kapasitas maksimal pejabat pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang baik yang tepat sasaran.	Partisipasi Masyarakat (Cohen & Uphoff) a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; b) Partisipasi dalam pelaksanaan; c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat; d) Partisipasi dalam Evaluasi.
Mangihut Siregar ¹ Frederik Fernandez ² Yemy Tristanto ³ (2023)	"Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)" Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat yang diadakan di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak dalam mempertahankan Desa Mandiri memiliki peranan yang sangat krusial. Keterlibatan masyarakat yang telah dilakukan oleh kelompok maupun individu melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pengawasan	Partisipasi Masyarakat (Yadav dikutip dalam buku Unapdi 1980): a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; b) Partisipasi dalam pelaksanaan c) Partisipasi dalam pemantauan

	dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.	d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
--	--	--

Nama Peneliti	Tentang	Teori
Maulidia Maryam Zaenadin ¹ Dewi Noor Azijah ² Evi Priyanti ³ (2023)	“Akuntabilitas Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta pada Indeks Ketahanan Sosial Mewujudkan Desa Mandiri” Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan desa mandiri dan mendapatkan nilai indeks ketahanan sosial yang tinggi didukung oleh kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam berbagai urusan pemerintahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti musrembangdes serta menyampaikan kritik dan saran untuk kemajuan desa yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan aparaturnya. Setiap kebijakan dan program yang dilakukan oleh desa dengan melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yang ramah biaya kepada masyarakat, dengan dukungan kawasan desa yang strategis dan masyarakat yang heterogen, namun ada masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan bumdes dengan gagalnya beberapa usaha karena kurangnya kompetensi yang ada dan kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.	Teori Partisipasi (Cohen dan Uphoff dalam Astuti Dwiningrum 2011) a) Partisipasi saat pengambilan keputusan; b) Partisipasi dalam pelaksanaan; c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat; d) Partisipasi dalam evaluasi.

Sumber: Olahan Peneliti (2025).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif ini dengan maksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh serta mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Sehingga nantinya dapat diketahui. Objek yang diteliti adalah Partisipasi Masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam Mewujudkan Desa Mandiri dengan fokus penelitian melalui pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, studi literatur dan wawancara dengan jumlah total informan 15 orang mulai dari perangkat desa hingga masyarakat umum. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pastisipasi Masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam Mewujudkan Desa Mandiri

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun terakhir, Desa Toapaya Selatan menyandang status Desa Mandiri dengan skor sebesar 0,8383. Skor tersebut menunjukkan bahwa Desa Toapaya Selatan telah melampaui ambang batas minimal skor 0,8155 yang menjadi syarat untuk masuk dalam kategori desa mandiri.

Pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan indikator IDM, sehingga status desa mandiri dapat tercapai dan dipertahankan. Indikator ini menjadi acuan dalam menentukan tingkat kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Toapaya Selatan, menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang meliputi 4 indikator:

Partipasi dalam Pengambilan Keputusan

a) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada aspek Ketahanan Sosial

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan keputusan sosial terlihat aktif melalui berbagai forum seperti Musdus, Musrenbangdes, dan Musdessus. Warga menyampaikan aspirasi terkait layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan melalui perwakilan seperti RT, RW, kader Posyandu, dan tokoh masyarakat. Proses ini diawali dari penggalan gagasan di tingkat RT yang dirangkum hingga ke forum desa, lalu dirumuskan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes.

Menurut Sekretaris Desa dan Ketua BPD, seluruh program dirancang berdasarkan masukan warga yang disaring sesuai skala prioritas. Forum seperti Musrenbang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah pengambilan keputusan partisipatif. Meski tidak semua usulan direalisasikan langsung, warga merasa aspirasinya dihargai.

Partisipasi juga terlihat pada isu kesehatan dan permukiman, seperti penyediaan makanan tambahan balita, Posyandu, pembangunan drainase, dan penerangan jalan. Kegiatan ini menandakan bahwa masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Meski begitu, keterbatasan waktu warga untuk hadir langsung menjadi tantangan. Namun, sistem perwakilan dan dokumentasi aspirasi tetap menjamin suara masyarakat tersalurkan secara adil dan terencana.

b) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada aspek Ketahanan Ekonomi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan keputusan bidang ketahanan ekonomi tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi lokal. Warga menyampaikan usulan melalui forum RT dan RW, yang kemudian diolah dalam musyawarah dusun hingga desa. Usulan tersebut mencakup pelatihan keterampilan seperti pengolahan sabut kelapa, pembuatan sabun, dan pelatihan UMKM, terutama bagi perempuan dan pemuda.

Menurut Ketua BPD, setiap program ekonomi dibahas secara terbuka dalam Musyawarah Desa, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan turut menyepakati keputusan. Pemerintah desa merespons aspirasi tersebut dengan mewujudkan program nyata, seperti pendirian 13 unit kios desa oleh BUMDes yang disewakan secara transparan kepada warga.

Lima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terbentuk melalui kesepakatan warga dan turut menyusun serta mengawasi program usaha mereka. Keberadaan LKD dan sistem keuangan partisipatif menunjukkan komitmen desa membangun sistem ekonomi yang inklusif dan akuntabel.

Selain itu, forum musyawarah khusus ketahanan pangan menjadi wadah warga dalam menentukan prioritas program pertanian, peternakan, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan seperti Pasar Tumpah dan berbagai pelatihan ekonomi memperkuat posisi warga sebagai subjek dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

c) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada aspek Ketahanan Ekologi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan keputusan terkait ketahanan ekologi dilakukan secara aktif, meskipun lebih banyak melalui perwakilan seperti RT, RW, dan lembaga desa. Proses dimulai dari penggalan aspirasi di tingkat RT, kemudian dibahas dalam forum dusun hingga Musrenbangdes. Usulan warga mencakup pembangunan drainase, pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Pelibatan masyarakat dilakukan

melalui Tim RKP dan forum musyawarah desa yang menghadirkan tokoh masyarakat, perempuan, dan kader desa. Meski keterlibatan langsung masih terbatas karena waktu dan kesibukan warga, suara masyarakat tetap diakomodasi melalui sistem representatif yang berjalan efektif.

Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, budidaya jamur, kerajinan sabut kelapa, dan kegiatan keamanan lingkungan menunjukkan adanya sinergi antara partisipasi warga dan pembangunan berkelanjutan. Forum-forum seperti musyawarah malam hari juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog membahas stabilitas dan ketertiban lingkungan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan lingkungan di Toapaya Selatan cukup baik. Pemerintah desa membuka ruang aspirasi dan mengintegrasikan usulan warga dalam program prioritas, meskipun ke depan pelibatan langsung perlu terus ditingkatkan agar semakin inklusif dan menyeluruh.

Partisipasi dalam Pelaksanaan

a) Partisipasi dalam Pelaksanaan pada aspek Ketahanan Sosial

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pelaksanaan pembangunan sosial terlihat aktif dan menyeluruh. Warga dari berbagai elemen seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, lansia, tokoh agama, dan kader desa turut terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan ini bukanlah hal yang baru, sebab sebagian besar program pembangunan sosial di desa memang berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Hal ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya.

Salah satu contohnya adalah kegiatan *Rembug Stunting* yang digelar sebagai bentuk komitmen desa dalam menangani kasus stunting. Kegiatan ini melibatkan Puskesmas, bidan desa, kader Posyandu, KPM, dan Tim Pendamping Keluarga untuk memberikan edukasi terkait gizi dan pola asuh anak. Selain itu, kegiatan seperti PORSEDAYA (Pekan Olahraga, Seni, dan Budaya Desa), pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK, serta pelatihan keuangan desa menjadi ajang memperkuat solidaritas sosial antarwarga.

Pelibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sosial di Desa Toapaya Selatan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang memperkuat ketahanan sosial berbasis gotong royong dan keterlibatan nyata warga desa.

b) Partisipasi dalam Pelaksanaan pada aspek Ketahanan Ekonomi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pelaksanaan program ketahanan ekonomi sangat menonjol melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan usaha lokal. Warga turut serta dalam pelatihan keterampilan seperti pembuatan sabun, kerajinan sabut kelapa, budidaya lele dan jamur tiram, hingga pelatihan kewirausahaan. Kelompok perempuan, lansia, dan pemuda, terutama melalui Karang Taruna, menjadi bagian penting dari pelaksana kegiatan.

BUMDes Mitra Karya Sejahtera menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi desa, membuka peluang kerja lewat pengelolaan kios desa dan pelaksanaan *Pasar Tumpah*. Dalam kegiatan ini, warga diundang untuk menjual produk seperti makanan, kerajinan, hingga hasil pertanian, dengan stan yang disediakan secara gratis. Ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat dari bawah.

Desa juga memfasilitasi pembentukan lima Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang mengelola berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, dan industri rumahan. KUBE ini menyasar warga miskin potensial yang memiliki keterampilan namun minim modal. Dukungan desa diperkuat melalui akses layanan keuangan dari Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPKP), yang membantu memperkuat ekonomi rumah tangga dan mendukung produksi lokal.

Secara keseluruhan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana aktif dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi yang berkelanjutan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa secara menyeluruh.

c) Partisipasi dalam Pelaksanaan pada aspek Ketahanan Ekologi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pelaksanaan program ketahanan ekologi tercermin melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan gotong royong, penghijauan, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur lingkungan. Kegiatan seperti *Gerbang Kampung* (Gerakan Membangun Kampung) menjadi ruang partisipatif yang melibatkan warga dalam membersihkan lingkungan, pembangunan drainase, dan normalisasi saluran air.

Masyarakat juga berperan dalam program produktif berbasis lingkungan, seperti budidaya sayur oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), budidaya ikan air tawar, dan pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok pra lansia. Program-program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan di masing-masing RT setiap bulan, dengan pelibatan warga secara langsung maupun tidak langsung. Bagi warga yang tidak bisa hadir, kontribusi tetap diberikan melalui bentuk lain seperti konsumsi atau bahan bangunan. Meski partisipasi tidak merata di semua wilayah, semangat kebersamaan tetap dijaga melalui komunikasi dan koordinasi antarwarga dan perangkat desa.

Dalam pembangunan fisik yang berdampak pada lingkungan, seperti pemasangan paving block dan pembangunan rabat beton, desa memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sistem ini memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap pembangunan dan menjamin perputaran manfaat ekonomi di dalam desa. Pendamping desa juga mencatat bahwa partisipasi masyarakat tak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga pengawasan, yang menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan ekologis berbasis masyarakat.

Kesadaran warga menjadi penggerak utama partisipasi ini, meskipun tantangan tetap ada pada kurangnya minat sebagian kecil masyarakat. Namun secara umum, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program lingkungan menunjukkan bahwa Desa Toapaya Selatan telah mengembangkan pola pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

a) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat pada aspek Ketahanan Sosial

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan manfaat pada aspek ketahanan sosial tercermin dari keterlibatan warga dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pemerintah desa mengedepankan pemerataan manfaat berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari tingkat RT hingga Musyawarah Desa. Meskipun tidak semua kelompok menerima manfaat secara bersamaan, sistem rotasi dan skala prioritas diterapkan untuk memastikan keadilan distribusi.

Warga turut memanfaatkan berbagai fasilitas sosial seperti Posyandu, PAUD, dan Rumah Desa Sehat, serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti HUT Desa, gotong royong, dan kegiatan keagamaan. Saat terjadi perbedaan pandangan mengenai pembagian manfaat, masyarakat menyampaikannya melalui forum musyawarah secara terbuka.

Melalui komunikasi yang transparan antara pemerintah desa dan masyarakat, rasa saling percaya terbangun dengan baik. Ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan sosial dapat dinikmati secara adil oleh seluruh warga desa.

b) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat pada aspek Ketahanan Ekonomi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan manfaat pada aspek ketahanan ekonomi tercermin melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Warga tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi juga sebagai pengelola program seperti KUBE, pelatihan UMKM, pengembangan kerajinan sabut kelapa, budidaya lele dan jamur tiram, hingga pengelolaan kios desa oleh BUMDes. Program ini umumnya berangkat dari usulan masyarakat sendiri, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Selain menerima bantuan modal atau alat, warga dilibatkan dalam perencanaan, pelatihan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Keberadaan Lembaga Keuangan Desa dan Simpan Pinjam Perempuan juga memperkuat akses terhadap sistem keuangan yang inklusif. Kegiatan seperti Pasar Tumpah dan pelatihan kewirausahaan menjadi sarana pemanfaatan hasil pembangunan sekaligus penggerak ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau semua kelompok secara merata. Beberapa program seperti bantuan ternak memerlukan kesiapan teknis dari masyarakat, seperti ketersediaan kandang. Proses musyawarah desa yang menjadi dasar keputusan program dianggap adil oleh sebagian besar warga, meskipun keterbatasan anggaran membuat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Tetap, partisipasi aktif masyarakat telah menjadi kunci dalam pengelolaan dan keberlanjutan manfaat ekonomi di desa.

c) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat pada aspek Ketahanan Ekologi

Masyarakat Desa Toapaya Selatan menunjukkan partisipasi aktif dalam pengambilan manfaat di bidang ketahanan ekologi melalui keterlibatan dalam berbagai program lingkungan. Kegiatan seperti budidaya sayur oleh Kelompok Wanita Tani, pemanfaatan kolam perikanan, dan pertanian pekarangan mencerminkan pemanfaatan hasil pembangunan secara langsung oleh warga. Selain itu, pembangunan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan saluran air melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) turut memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah desa menerapkan sistem rotasi wilayah dan skala prioritas dalam pembagian manfaat lingkungan agar setiap wilayah mendapat giliran secara adil. Misalnya, jika RW tertentu menjadi prioritas tahun ini, maka RW lain akan menyusul tahun berikutnya. Masyarakat juga aktif menjaga fasilitas yang telah dibangun, seperti sarana sanitasi, posyandu, dan area hijau desa, menandakan kesadaran ekologis yang tumbuh dari keterlibatan mereka.

Adanya forum komunikasi dua arah, seperti musyawarah desa, memungkinkan warga menyampaikan aspirasi jika ada ketimpangan dalam distribusi manfaat. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga mitra dalam menjaga keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan.

2. Partisipasi dalam Evaluasi

a) Partisipasi dalam Evaluasi pada aspek Ketahanan Sosial

Dalam aspek ketahanan sosial, partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam evaluasi pembangunan dilakukan melalui mekanisme formal dan informal. Pemerintah desa rutin mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) serta pertemuan tingkat RT dan RW sebagai forum untuk menampung evaluasi warga terhadap program-program sosial. Sekretaris Desa menekankan pentingnya masukan masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan. Proses evaluasi ini melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, ibu-ibu kader, hingga perwakilan pemuda, guna menjamin keterwakilan suara masyarakat secara adil. Selain forum resmi, evaluasi juga berjalan secara informal, seperti masukan warga yang disampaikan langsung kepada RT dan diteruskan ke pemerintah desa.

Keterbukaan desa terhadap kritik dan saran warga turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Bahkan saat usulan belum bisa langsung diwujudkan, warga tetap merasa dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi sosial berperan penting dalam membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa.

b) Partisipasi dalam Evaluasi pada aspek Ketahanan Ekonomi

Dalam aspek ketahanan ekonomi, evaluasi program dilakukan melalui keterlibatan langsung masyarakat berdasarkan pengalaman mereka sebagai penerima manfaat. Program-program seperti pelatihan UMKM, budidaya jamur dan lele, pengembangan KUBE, serta pengelolaan sistem keuangan desa dievaluasi secara terbuka untuk menilai efektivitas dan menyesuaikan arah kebijakan.

Meski belum merata, keterlibatan warga dalam evaluasi sudah berjalan, baik melalui forum resmi maupun jalur informal. Banyak warga lebih nyaman menyampaikan pendapat melalui RT atau dalam obrolan santai, yang sering kali justru menghasilkan masukan yang jujur dan relevan. Pendamping Desa mencatat bahwa umpan balik masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan anggaran dan prioritas program ke depan.

Masukan terkait kendala teknis, lokasi kegiatan, atau keterbatasan sarana menjadi acuan untuk menyempurnakan program selanjutnya. Kegiatan seperti Pasar Tumpah (Expo), pengelolaan kios BUMDes, dan pelatihan kewirausahaan tak hanya menjadi wadah aktivitas ekonomi, tetapi juga media evaluasi partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi ekonomi bukan sekadar menilai hasil, tetapi menjadi proses pembelajaran kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

c) Partisipasi dalam Evaluasi pada aspek Ketahanan Ekologi

Partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam evaluasi aspek ketahanan ekologi tercermin dari keterlibatan mereka dalam menilai program lingkungan, seperti pembangunan drainase, rabat beton, pengelolaan saluran air, dan pemanfaatan pekarangan. Evaluasi dilakukan melalui forum formal seperti musyawarah desa dan juga secara informal di tingkat komunitas kecil.

Warga aktif memberikan penilaian terhadap kualitas pembangunan dan keadilan distribusi antarwilayah. Jika ada wilayah yang merasa belum mendapat giliran pembangunan, hal ini dikaji dan dipertimbangkan dalam forum evaluasi serta perencanaan tahun berikutnya. Kepala Dusun menjelaskan bahwa setiap masukan ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran desa, menandakan masyarakat mulai memahami proses perencanaan secara menyeluruh.

Selain forum resmi, evaluasi juga muncul saat kegiatan gotong royong dan bersih lingkungan. Warga kerap menyampaikan keluhan langsung, misalnya soal drainase yang tidak efektif atau genangan air. Saluran informal ini menjadi penting dalam menjamin fungsi lingkungan tetap berjalan baik serta memperkuat kolaborasi antara warga dan pemerintah desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Toapaya Selatan, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri berjalan secara aktif dan terstruktur melalui tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah berjenjang dari RT hingga desa, meski keterlibatan langsung masih terkendala waktu dan insentif. Pada tahap pelaksanaan, warga terlibat dalam kegiatan fisik dan sosial seperti gotong royong, pelatihan UMKM, dan pembangunan infrastruktur desa, serta turut mengawasi jalannya program. Manfaat pembangunan juga dirasakan secara langsung melalui BUMDes, bantuan sosial, dan fasilitas

publik yang dikelola bersama, meskipun distribusinya dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Evaluasi dilakukan melalui forum musyawarah dan jalur informal, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk memberi masukan yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah desa. Meskipun masih ada tantangan dalam pelibatan langsung dan penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat telah menjadi fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan status Desa Mandiri di Toapaya Selatan.

Saran

Partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Desa Mandiri. Untuk memperkuatnya, ruang musyawarah perlu diperluas melalui forum dusun dan kanal digital agar aspirasi warga terserap lebih merata. Pelibatan aktif dalam pelaksanaan dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim kerja berbasis potensi lokal dan gotong royong tematik. Pemantauan distribusi manfaat secara berkala penting dilakukan guna menjamin keadilan, sementara penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan perlu ditanamkan sebagai bentuk rasa memiliki. Evaluasi pembangunan sebaiknya dibuka secara inklusif, tidak hanya melalui tokoh tertentu, tetapi juga melibatkan suara kritis dari berbagai lapisan masyarakat. Penguatan kapasitas, replikasi praktik baik, dan pemanfaatan data berbasis kondisi riil akan mendorong pembangunan desa yang lebih responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anon. (n.d.). Data Statistik - Portal Pemerintah Desa Toapaya Selatan. Diakses 12 Mei 2025, dari <https://toapayaselatan.simdesprima.id/data/>
- Arifin, Z., & Susanto, M. (2020). Perancangan sistem informasi rekrutmen pegawai desa menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (JSII)*, 4(2), 141–149. <https://doi.org/10.33369/jsii.v4i2.9450>
- Effendi, I. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Fauzia, R., Isnainia, B., & Arieffiani, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Studi pada Bank Sampah Kota Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 23(2), 51. <https://doi.org/10.30649/aamama.v23i2.137>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>

- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Maulidina, R., & Putra, A. R. (2023). Perancangan sistem informasi penerimaan karyawan menggunakan metode waterfall. *Jurnal Teknolo gi dan Sistem Komputer*, 11(1), 15–21. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.11.1.15-21>
- Muallif. (2024). Desa mandiri: Strategi pembangunan, potensi, dan tantangan menuju kemandirian desa – Universitas Islam An Nur Lampung. Diakses 6 Februari 2025, dari <https://an-nur.ac.id/desa-mandiri-konsep-indikator-dan-contoh/>
- Ompusunggu, C. (2022). Dynamic governance dalam upaya Desa Toapaya Selatan mewujudkan desa mandiri di tahun 2023. Diakses 6 Februari 2025, dari http://repository.umrah.ac.id/3078/3/Christina%20Ompusunggu_180563201124_Ilmu%20Adm.%20Negara_Cover.pdf
- Paiswandi. (2020). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/>
- Santosa, D., & Dewi, K. A. (2022). Evaluasi sistem informasi desa menggunakan pendekatan user acceptance. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 9(1), 87–94.
- Setiawan, A. (2022). Pemerintahan desa (Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa) (A. Khanafi, Ed.). Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbitan CV Budi Utama).
- Siregar, M., Fernandez, F., & Trisanto, Y. (2023). Partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.30742/JUISPOL.V3I1.2889>
- Zaenadine, M. M., Azijah, D. N., & Priyanti, E. (2023). Akuntabilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat Desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta pada Indeks Ketahanan Sosial mewujudkan desa mandiri. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5159–5172. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26981>